

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Arikunto Suharsimi, dan Cipi Safrudin. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Azhar Kasim. 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bagir Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSH FH UII.
- 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Harapan.
- 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: ind-hill Co.
- 2003. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Budiman. 2005. *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Eni Suharti. 2014. *MD3 (UU RI No. Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRD*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Entol Zaenal Muttaqin. 2014. *Pokok-pokok Hukum ketatanegaraan*. Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo. 2010. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana.

- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- J. Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- 2005. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Watampone Press.
- 2012. *Teori Hans Jeksen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Kaka Alvian Nasution. 2014. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Yogyakarta: Saufa.
- King Faisal Sulaiman. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2013. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhammad Fauzan. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah. Edisi revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Muhammad Ichwan. 1989. *Aministrasi Keuangan Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

- Ni'matul Huda. 2005. *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FHUII Press.
- 2008. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2010. *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: FH-UII Press.
- 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Patuan Sinaga. 2001. *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: UNAIR.
- 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Prajudi Atmosudirdjo. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Wiyono. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riawan Tjandra & Kresno Budi. 2009. *Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Atmajaya Press.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosyidi Ranggawidjaja. 2010. *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rozali Abdullah. 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sadjiyono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.
- Satya Arianto. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: PSH Tata Negara FH UI.
- Siagian. 2003. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sirajuddin Dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press.
- Siswanto Sunarto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Makassar: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sondang. P. Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2002. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Jogjakarta: Hanggar Kreator.
- Sulaiman, K. F. 2014. *Dialektika pengujian peraturan daerah pasca otonomi daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunoto. 1997. *Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kantor Menteri Lingkungan Hidup.

- Supradan. 2005. *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Perca.
- Suriansyah Murhani. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sutra Ningsi. 2010. *Inventarisasi dan Evaluasi Perda, bab dalam Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Suwoto Mulyosudarmo. 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas. Jakarta.
- Victor Situmorang dan Jusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- WJS. Poerwadarminta. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yusnani Hasyimzoem. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU Nomor 2 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137.
- Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

C. Jurnal

A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia).

A. Zakarsi, “Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Disertasi Unpar, Bandung, 1983.

Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono, “Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Dan Dewan Perwakilan Daerah (Dualism Supervision Authority of Local Regulation Draft by Central Government and Regional Representative Council)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 403-418.

Fatkhurohman, “Implikasi Pembatalan Perda Terhadap Ketepatan Proporsi Teori Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 Nomor 1 Januari 2013.

Forum Keadilan, “Jokowi Resmi Hapus 3.143 Perda Bermasalah”, *Jurnal Forum Keadilan* No. 10, Tahun XXV/27 Juni-17 Juli 2016.

M. Zainor Ridho, “Eksistensi DPD”, *Jurnal Al-Ahkam, (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan)*, Serang, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Vol 4 No 1, 2016.

Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, hlm. 180-181.

- Ni'matul Huda, "Urgensi *Judicial Review* Dalam Tata Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol.15, 2008
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Yuridika* Nomor 5 dan 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid)*, (Bandung, dalam Pro Justitia, Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, No.1, Tahun XVI)
- Tikawija, "Pengertian dan Tujuan Pengawasan", diakses melalui <http://tikawija.wordpress.com/2010/04/08/pengertian-dan-tujuan-pengawasan/> diakses pada tanggal 1 November 2011
- Rosdianasari, Eko Susi; Anggriani, Novi; Mulyani, Basri; Soetono, Bambang, "Dinamika Penyusunan, Substansi Dan Implementasi Perda Pelayanan Publik", YIPD, ADKASI, dan *Justice For The Poor The World Bank*, Bandung, 2009.
- Sholikin, M. N., Rofiandri, R., dkk (2011). *Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung*. Indonesian Center for Law and Policy Studies, 2011.
- Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 8 No. 2, Oktober 2017.

D. Artikel Internet

- Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, "Kemendagri Sisir 6.000 Perda Bermasalah", diakses melalui <https://litbang.kemendagri.go.id/website/kemendagri-sisir-6-000-perda-bermasalahk>, tanggal akses 24 Desember 2022.
- Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, <http://restuningmaharani.com>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.
- Hukumonline.com, "3143 Perda bermasalah dibatalkan ini penjelasan presiden", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575ea1862a089/3143-perda-bermasalah-dibatalkan--ini-penjelasan-presiden>. Diakses pada tanggal 17-08-2018 pukul 22.49.
- Kemendagri, "Presiden Umumkan Pembatalan 3143 Perda Bermasalah", diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/>

presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah, diakses pada tanggal 17-08-2018 pukul 21.49.M. Imam Nasef, “Anomali Pembatalan Perda”, diakses melalui <http://news.detik.com/read/2016/06/23/120229/3240276/103/anomali-pembatalan-perda>, diakses pada tanggal 25 M ggal 25 Maret 2023.